

Tulisan ini dimaksudkan untuk menyambut Hari Guru Nasional dan HUT PGRI Tahun 2011

GURU : PENGAWAL KEUTUHAN NKRI

Oleh Buchory MS

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para guru di negeri ini sudah terpanggil untuk ambil bagian dalam rangka mengisi kemerdekaan. Semua komponen bangsa Indonesia saat itu memang dituntut untuk bahu membahu dan bekerja sama dalam upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah dicapai berkat perjuangan panjang dan korban manusia dan harta benda yang tiada tara besarnya. Sebagai upaya nyata ikut berpartisipasi aktif mengisi kemerdekaan, maka untuk membantu Pemerintah dalam mewujudkan tujuan berdirinya negara kita, terutama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, guru-guru dari semua jenjang dan jenis pendidikan bergabung dalam satu wadah organisasi profesi.

Para guru saat itu didorong oleh keinginan yang luhur untuk berpartisipasi aktif menegakkan, mengamankan, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan, maka hanya dalam waktu sekitar tiga bulan setelah merdeka, tepatnya tanggal 25 Nopember 1945, mereka mengadakan konggres pertama di Surakarta dan bersepakat mendirikan sebuah organisasi guru yang disebut Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Sebagai tempat berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan, PGRI merupakan organisasi perjuangan, organisasi profesi yang berupaya meningkatkan persatuan dan kesatuan yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahir dan batin. Untuk itu PGRI dengan didukung oleh seluruh anggotanya, secara terus menerus berupaya mewujudkan pengabdianya melalui pembinaan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya, membina serta mengembangkan pendidikan dan kebudayaan bagi pembangunan dan kemajuan serta keutuhan negeri ini.

Kini setelah enam puluh satu tahun lebih negara kita merdeka, realitas objektif menunjukkan bahwa masih terdapat daerah-daerah yang masuk dalam kategori daerah

tiga T, yaitu daerah **terdepan** yang merupakan wilayah yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara lain, daerah **terluar** yaitu wilayah yang berhadapan dengan laut lepas, dan kedua wilayah tersebut pada umumnya termasuk daerah **tertinggal**. Kondisi pendidikan di daerah ini masih memprihatinkan kita. Permasalahan pendidikan di daerah tersebut antara lain adalah kekurangan guru dan tenaga kependidikan, karena masih ada sekolah dasar yang hanya memiliki seorang kepala sekolah dan seorang guru. Cerita kondisi sekolah dan proses pembelajaran seperti dalam kisah film Laskar Pelangi masih menjadi realitas objektif di daerah tiga T. Terjadi distribusi guru yang tidak merata, yang masih sangat kekurangan. Di samping itu juga terjadi disparitas kualitas pendidikan, tingginya angka putus sekolah, dan rendahnya angka partisipasi sekolah. Kondisi seperti ini sangat rawan ditinjau dari aspek keutuhan NKRI dan menjadi potensi disintegrasi bangsa dan negara. Masyarakat di daerah ini merasakan adanya ketidakadilan dalam kehidupan di negara kita karena kondisi mereka sehari-hari masih serba terbelakang dibandingkan kondisi masyarakat di daerah lain apalagi di kota-kota besar. Mereka yang tinggal di daerah perbatasan, dihadapkan dengan pemandangan dan kemajuan negara lain yang jauh berbeda dengan kondisi keseharian mereka. Di sinilah perlunya membangun daerah tiga T untuk mengejar ketertinggalannya melalui peningkatan kualitas pendidikan antara lain dengan meningkatkan tenaga guru baik secara kuantitas maupun secara kualitasnya.

Kalau kita simak pengalaman sejarah dalam upaya memajukan daerah-daerah yang termasuk kategori tiga T, sudah dirintis berbagai kegiatan yang dilakukan untuk maksud tersebut. Pada tahun 1950 an pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan program Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) yang tujuannya waktu itu adalah untuk mengurangi perbedaan kemajuan antara Jawa dengan luar Jawa. Dalam perjalanannya, pada tahun 1971/1972 kegiatan PTM dirintis menjadi program pengabdian mahasiswa pada masyarakat yang menjadi cikal bakal kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pada tahun 1973, diluncurkan program Bimbingan Massal (Bimas) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang dikoordinasikan oleh Badan Urusan Tenaga Sukarela Indonesia (BUTSI). Selanjutnya program untuk memajukan daerah tiga T juga dilakukan dalam bentuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) yang masih berjalan sampai sekarang yang menjadi program dari Kementerian

Pemuda dan Olah Raga.

Dalam rangka memenuhi tenaga guru khususnya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah tiga T, Menteri Pendidikan Nasional beberapa waktu yang lalu melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Panglima TNI. Tujuannya adalah agar aparat tentara nasional yang bertugas di daerah tiga T juga ditugaskan menjadi guru di sekolah setempat. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya masalah kekurangan guru terutama di daerah tiga T, sampai ada keinginan menugaskan aparat keamanan untuk mengatasinya. Di samping kegiatan itu, untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan guru di daerah tiga T, dewasa ini Kemendikbud melaksanakan suatu program yang disebut **Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia**. Program ini terdiri atas (a) program Pendidikan Profesi Guru untuk Daerah tiga T (PPGT), (b) program Sarjana Mendidik di daerah tiga T (SM-3T), (c) program Sarjana Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (S1 KKT), dan (d) program PPGT Kolaborasi.

Program PPGT yaitu program penyiapan Sarjana Pendidikan yang dilanjutkan dengan program Pendidikan Profesi Guru yang inputnya berasal dari putra-putri yang berasal dari daerah tiga T sehingga kelak setelah mereka selesai menempuh pendidikan, wajib kembali mengabdikan menjadi guru di daerahnya, bahkan mereka juga memiliki kewenangan tambahan. Sebagai contoh mereka berwenang menjadi guru kelas SD dan memiliki kewenangan tambahan mengajar pada salah satu mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKN, IPS, IPA, dan Matematika) di SMP. Program SM-3T adalah program pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T dan sekaligus pembekalan untuk penyiapan guru profesional. Mereka akan mengabdikan di daerah tiga T selama satu tahun dan setelah selesai mendapat *reward* atau hadiah mengikuti program PPG untuk mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru profesional.

Program S1-KKT merupakan program pemberian kompetensi tambahan selain kompetensi utama yang dilakukan melalui penambahan pendidikan akademik, baik bagi mahasiswa yang masih menempuh kuliah atau sudah lulus S1 kependidikan maupun guru dalam jabatan yang telah memiliki sertifikat pendidik. Program ini bertujuan untuk menghasilkan guru dan calon guru yang memiliki keunggulan dalam kompetensi sebagai

guru profesional dengan kewenangan tambahan mengajar mata pelajaran lain di luar kewenangan utama. Sementara itu program PPGT Kolaboratif dimaksudkan untuk menyiapkan calon guru di daerah tiga T khususnya guru bidang studi di SMK yang tidak dapat disediakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Pelaksanaan program ini dilakukan dengan cara LPTK melakukan kolaborasi dengan politeknik atau lembaga lain yang terkait untuk menyiapkan guru profesional. Sebagai contoh untuk menyiapkan calon guru bidang studi pertanian, peternakan, dan perikanan maka LPTK berkolaborasi dengan politeknik yang menyelenggarakan bidang-bidang tersebut.

Berbagai program dan kegiatan di atas, apabila dapat terlaksana dengan baik akan dapat mengantisipasi dan mengatasi kebutuhan tenaga guru untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di daerah tiga T. Hal ini disadari bahwa guru merupakan komponen utama dalam dunia pendidikan sehingga keberadaannya menjadi penentu maju atau mundurnya kualitas pendidikan. Dengan berkembangnya kualitas pendidikan di daerah ini, maka peran guru sebagai penyangga dan pengawal mutu NKRI dapat diwujudkan. Semoga.

(Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd adalah anggota Dewan Pendidikan Propinsi DIY bidang Persekolahan dan Keguruan, Ketua Biro Litbang Pengurus PGRI Propinsi DIY, anggota Tim PPG Ditjen Dikti, dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Yogyakarta (UPY).